

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh penyelenggara negara biasanya diawali dengan adanya celah dalam suatu sistem yang dikonversi menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan pemufakatan jahat oleh aparatur terkait. Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kondisi ini berpotensi terhadap kualitas keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara terkait dan dapat membuat terjadinya tindak pidana korupsi (Manaf, 2016). Tindakan seperti ini tentunya akan menjadi sulit untuk dibongkar ketika para pihak terkait telah bersepakat untuk saling menutupi atau melakukan konspirasi.

Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Puslitbangwas BPKP) mengungkapkan bahwa konspirasi dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi memiliki daya yang sangat merusak bagi organisasi (Nurhidayat, 2020). Konspirasi khususnya dalam perilaku korupsi di dalam organisasi bisa terjadi karena adanya sinergitas antara aksi tutup mulut (*silence*) dan sifat kerahasiaan (*secret*) yang

dilakukan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pengawasan intern pemerintah menjadi suatu hal penting yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di ruang lingkup pemerintah.

Digitalisasi dan pemutakhiran teknologi merupakan salah satu kunci dari berhasilnya pengawasan internal pemerintah. Dengan adanya pelayanan publik yang sudah terintegrasi dengan sistem pengendalian berbasis digital, maka pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan. Dalam rangka menciptakan pengawasan yang maksimal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku aparat pengawasan intern pemerintah menciptakan sistem pelaporan pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan *Whistleblowing System* (WBS).

Berdasarkan studi kantor akuntan internasional, adanya *Whistleblowing System* berhasil mengungkapkan lebih dari 25% tindakan fraud. Hal ini sejalan dengan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimana selama 3 tahun terakhir pelaporan dengan menggunakan *Whistleblowing System* telah meningkat hingga 65%. Dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Whistleblowing System Internal”, Atika Zarefar dan Tobi Arfan memaparkan bahwa setidaknya ada 3 variabel yang menjadi pendukung dalam meningkatkan efektivitas *Whistleblowing System* sebagai alat pengawasan internal, diantaranya adalah pelatihan dan komunikasi, kepemimpinan transformasional, dan dukungan manajemen tingkat atas.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan sistem pelaporan secara anonim telah berkembang menjadi lebih efektif dan efisien. Banyak media yang bisa digunakan

untuk mendukung *Whistleblowing System*, seperti sosial media, *e-mail*, dan *website* yang didesain secara khusus untuk menampung laporan dengan basis data yang terpusat. Dibuatnya *Whistleblowing System* ini sangat membantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengungkap segala bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPKP dalam menjalankan tugasnya.

Sehubungan dengan pentingnya tugas BPKP sebagai pengawas intern pemerintahan, penulis tertarik untuk melakukan studi yang membahas pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) dalam pencegahan terjadinya pelanggaran oleh pegawai BPKP dengan membuat karya tulis yang berjudul “Analisis Pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Alat Pengawasan Internal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai analisis pemanfaatan *Whistleblowing System* (BPKP), maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaporan tindakan pelanggaran dengan menggunakan *Whistleblowing System* (WBS)?
2. Bagaimana kelebihan, kekurangan, serta kendala apa saja yang ada pada *Whistleblowing System* (WBS) BPKP?
3. Bagaimana cara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke *Whistleblowing System* (WBS)?

4. Bagaimana perkembangan penggunaan *Whistleblowing System* (WBS) di BPKP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan tindakan pelanggaran dengan menggunakan *Whistleblowing System* (WBS).
2. Untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kendala yang ada pada *Whistleblowing System* (WBS) BPKP.
3. Untuk mengetahui cara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke *Whistleblowing System* (WBS).
4. Untuk mengetahui perkembangan penggunaan *Whistleblowing System* (WBS) di BPKP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada analisis pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai pengawasan internal di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penulis melakukan analisis dengan melihat mekanisme pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) BPKP dan penindaklanjutannya

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal pemanfaatan *Whistleblowing System* di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) . Selain itu, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan *Whistleblowing System* di ruang lingkup sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi media bagi penulis untuk mengetahui penerapan dan menambah wawasan mengenai *Whistleblowing System*, khususnya di ruang lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan memberikan gambaran mengenai *Whistleblowing System* di ruang lingkup sektor publik, khususnya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan *Whistleblowing System* di ruang lingkup sektor publik, khususnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teori – teori yang menjadi dasar penulis dalam melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan *Whistleblowing System* di ruang lingkup sektor publik, khususnya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang selanjutnya akan di uraikan hasilnya pada bagian pembahasan. Data – data yang diperoleh penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memuat sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi bagian pengawasan internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bab ini juga akan membahas hasil analisis data – data yang diperoleh mengenai pemanfaatan *Whistleblowing System* (WBS) untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis. Bab ini juga akan merangkum semua poin dan bahasan yang sudah disebutkan di bab – bab sebelumnya. Dengan demikian,

bab ini akan menjawab tujuan penelitian yang sekiranya bisa bermanfaat kedepannya.